

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : WIDA SINTIYA
NPM : E. 1735223163
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA
BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Akadun, M.Pd
NIDN. 00-3008-6401

Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-0111-8802

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WIDA SINTIYA
NPM : E. 1735223163
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL USULAN PENELITIAN : PERAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA
MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG
GELUNG DI DESA BAGINDA
KECAMATAN SUMEDANG
SELATAN KABUPATEN
SUMEDANG

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 07 Agustus 2021
Pukul : 08:00 WIB s/d Selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si ()
NIDN. 04-1605-8703

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()
NIDN. 04-0111-8802

Pembimbing I : Dr. H. Akadun, M.Pd ()
NIDN. 00-3008-6401

Pembimbing II : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()
NIDN. 04-0111-8802

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA
BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji
Pada Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I : Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd
NIDN. 00-2307-8007

()
Ttd 24 agustus 2021

Penguji II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si
NIDN. 99-0400-4066

()

Penguji III : Dhesti Widya NN, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-2712-8801

()

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

WIDA SINTIYA

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRAK

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA
BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : WIDA SINTIYA
NOMOR POKOK : E. 1735223163
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

133 halaman, 5 bab, 54 tabel, 4 gambar, 7 lampiran
Daftar pustaka: 8 buku, 8 jurnal elektronik, dan 4 dokumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintahan desa dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan potensi objek wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian, yaitu *purpose sampling*. Dengan informan penelitian, yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Baginda, Kepala Desa Baginda, Sekretaris Desa Baginda, Ketua Dusun II Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pengolahan data menggunakan *data reduction*, *data display*, *data conclusion drawing*, *verification* dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator sudah bisa dikatakan cukup baik, Pemerintah Desa sudah melakukan penataan disekitar wilayah Gunung Gelung, dari segi manajemen belum bisa dikatakan baik dikarenakan masih banyak hambatan yang salah satunya dari kualitas sumber daya yang kurang optimal dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, sebagai regulator belum bisa dikatakan baik karena *draft* Peraturan Desa terkait Gunung Gelung belum disahkan, sedangkan sebagai katalisator juga belum bisa dikatakan baik dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat dan tidak ada kerjasama dengan pihak swasta.

Saran yang dapat diberikan adalah segera disahkannya Peraturan Desa mengenai Gunung Gelung dan melakukan cara baru dalam bersosialisasi.

Kata kunci: Pemerintahan, Gunung Gelung

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN INCREASING THE VILLAGE'S ORIGINAL INCOME THROUGH THE DEVELOPMENT OF POTENTIAL TOURISM OBJECT OF GUNUNG GELUNG IN THE VILLAGE FOR THE DISTRICT OF SOUTH SUMEDANG REGENCY OF SUMEDANG

Compiled by:
NAME : WIDA SINTIYA
PRINCIPAL NUMBER : E. 1735223163
COURSE : STATE ADMINISTRATIVE SCIENCES

133 pages, 5 chapters, 54 tables, 4 images, 7 attachments
Bibliography: 8 books, 8 electronic journals, and 4 documents

The purpose of this research is to find out the role of village government seen from the perspective of the government's role as a facilitator, regulator and catalyst in increasing the village's original income through the development of potential tourist attraction Gunung Gelung in The Village Baginda South Sumedang District Sumedang.

The research method used in this study, which is qualitative research method. The technique of determining the informant research, namely *purpose sampling*. With research informants, namely the Chairman of the Village Consultative Agency Baginda, Head of Baginda Village, Secretary of Baginda Village, Head of Hamlet II Village Baginda District Sumedang Selatan Sumedang. Data collection techniques used, namely literature studies and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Data processing procedure using data reduction, display data, conclusion drawing, verification data and triangulation.

Based on the results of the research obtained the conclusion that the role of the government as a facilitator can be said to be quite good, the Village Government has done arrangements around the Gunung Gelung area, in terms of management can't be said well because there are still many obstacles, one of which is from the quality of resources that are not optimal and the mindset of the community is still traditional, as the regulator can't be said well because the *draft* village regulations related to Mount Gelung have not been ratified, while as catalysts also can't be said well because of the absence of support from the community and no cooperation with the private sector.

The advice that can be given is the immediate ratification of the Village Regulation on Mount Gelung and doing a new way of socializing.

Keywords: Government, Mount Gelung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi penulis selama proses penyusunan ini berlangsung. Namun berkat dorongan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu di dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs selaku Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Pd., M.Si. selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

6. Yth. Bapak Dr. H. Akadun, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I atas arahan dan masukannya.
7. Yth. Ibu Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II atas arahan dan masukannya.
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
9. Yth. Seluruh Staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
10. Yth. Bapak Elan Sukarlan selaku Kepala Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
11. Yth. Seluruh Aparatur Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Sumedang, Februari 2021

Penulis

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara	8
1. Pengertian Administrasi	8
2. Pengertian Administrasi Negara	10
3. Ruang Lingkup Adminitrasi Negara	11
4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian	12
B. Organisasi	14
1. Pengertian Organisasi	14
2. Peran Organisasi Publik	15
C. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	17
1. Pengertian Pemerintahan Desa	17
2. Peran Pemerintahan Desa	18
3. Pendapatan Asli Desa (PADes)	19
4. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	20
D. Kajian Penelitian Terdahulu	22
E. Kerangka Penelitian dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian	25
1. Kerangka Penelitian	25
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	28
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	31
1. Sasaran Penelitian	31
2. Informan Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	33
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Profil Singkat Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	37
2. Visi dan Misi Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	38
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.....	40
4. Karakteristik Sasaran Penelitian	44
B. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	47
1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator	48
2. Peran Pemerintah sebagai Regulator	81
3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

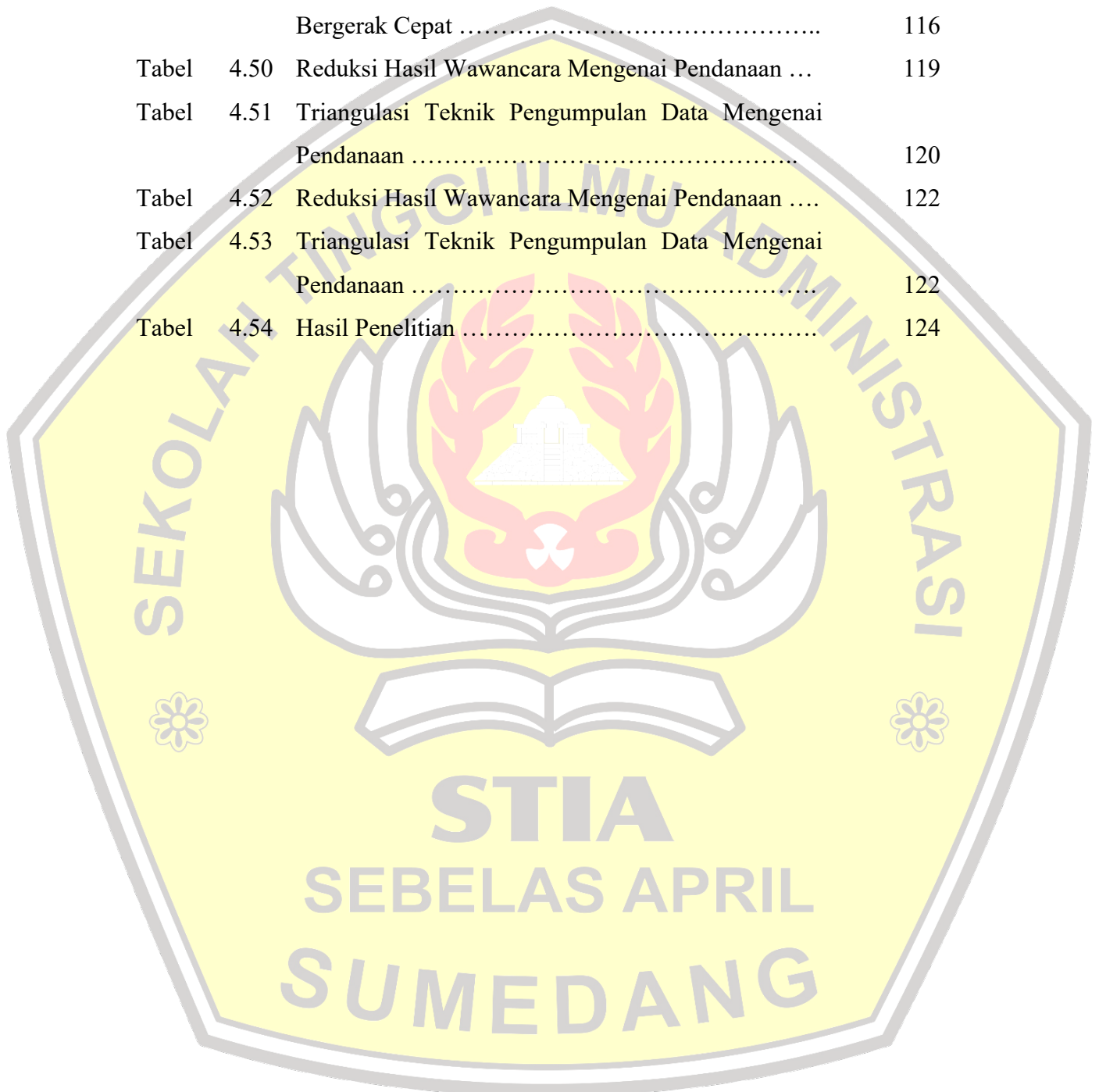
DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Total Pendapatan Objek Wisata Gunung Gelung 2020.....	3
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.2	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	27
Tabel 3.1	Informan Penelitian	32
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	36
Tabel 4.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	44
Tabel 4.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia	45
Tabel 4.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja	46
Tabel 4.4	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan..	50
Tabel 4.5	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Perencanaan	51
Tabel 4.6	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan ..	54
Tabel 4.7	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Perencanaan	54
Tabel 4.8	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan ..	56
Tabel 4.9	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Perencanaan	57
Tabel 4.10	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan ..	59
Tabel 4.11	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Perencanaan	60
Tabel 4.12	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan ..	62
Tabel 4.13	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai	

	Perencanaan	63
Tabel 4.14	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Perencanaan ..	66
Tabel 4.15	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Perencanaan	67
Tabel 4.16	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pendampingan	70
Tabel 4.17	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pendampingan	71
Tabel 4.18	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pendampingan	73
Tabel 4.19	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pendampingan	74
Tabel 4.20	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Kondisi yang Kondusif	77
Tabel 4.21	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kondisi yang Kondusif	77
Tabel 4.22	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Kondisi yang Kondusif	80
Tabel 4.23	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kondisi yang Kondusif	80
Tabel 4.24	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembuat Kebijakan	83
Tabel 4.25	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembuat Kebijakan	84
Tabel 4.26	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembuat Kebijakan.....	86
Tabel 4.27	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembuat Kebijakan	86
Tabel 4.28	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembuat Kebijakan	88
Tabel 4.29	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pembuat Kebijakan	89
Tabel 4.30	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembuat	

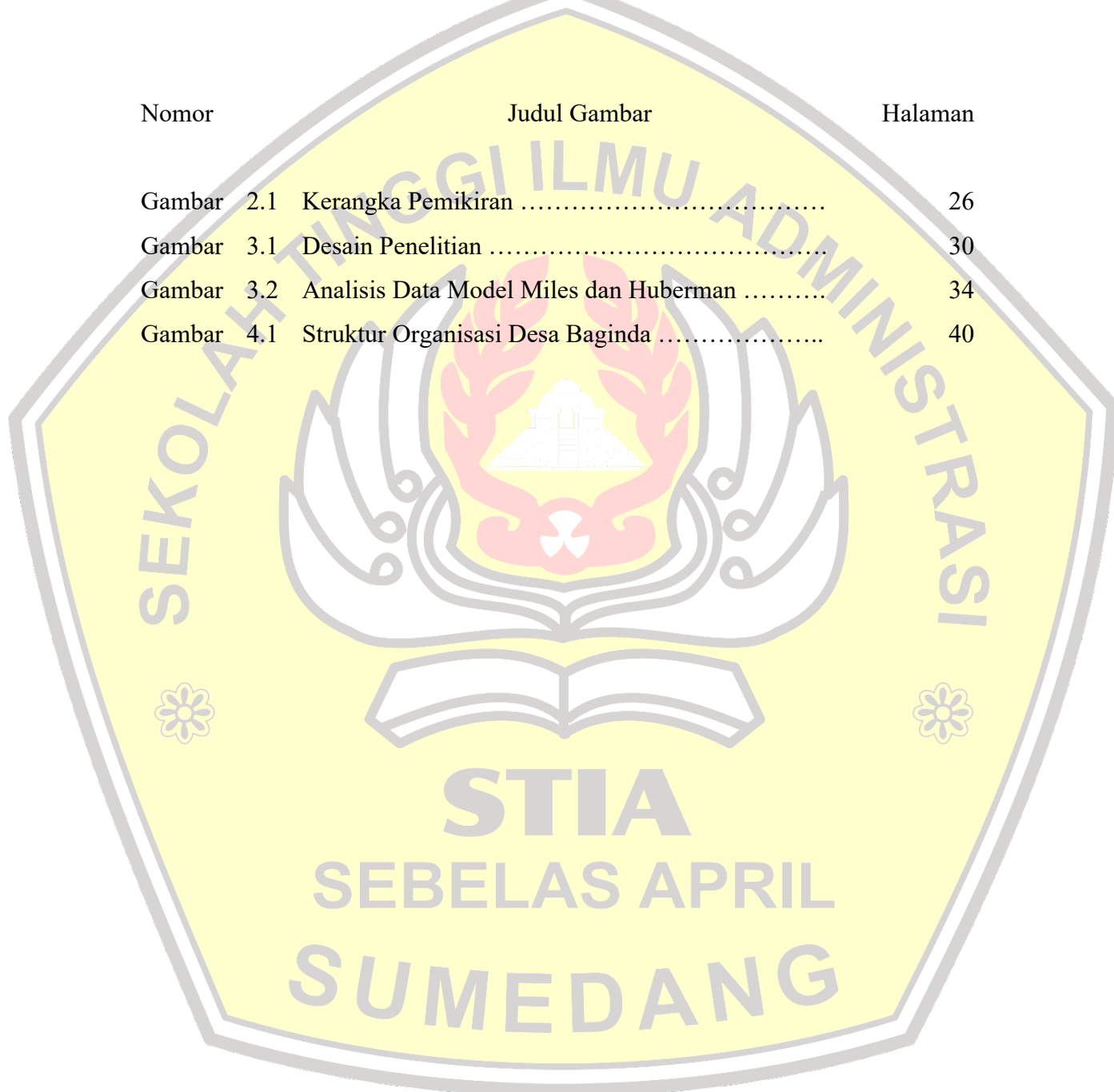
	Kebijakan.....	91
Tabel 4.31	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembuat Kebijakan	92
Tabel 4.32	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembagi Wewenang	94
Tabel 4.33	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembagi Wewenang	95
Tabel 4.34	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembagi Wewenang	97
Tabel 4.35	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembagi Wewenang	97
Tabel 4.36	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pembagi Wewenang	99
Tabel 4.37	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pembagi Wewenang	100
Tabel 4.38	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Sosialisasi	103
Tabel 4.39	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sosialisasi	104
Tabel 4.40	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Sosialisasi	106
Tabel 4.41	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sosialisasi	106
Tabel 4.42	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Sosialisasi	108
Tabel 4.43	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sosialisasi	109
Tabel 4.44	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Sosialisasi	111
Tabel 4.45	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sosialisasi	111
Tabel 4.46	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Bergerak Cepat.....	114
Tabel 4.47	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Bergerak Cepat	114

Tabel	4.48	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Bergerak Cepat	116
Tabel	4.49	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Bergerak Cepat	116
Tabel	4.50	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pendanaan ...	119
Tabel	4.51	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pendanaan	120
Tabel	4.52	Reduksi Hasil Wawancara Mengenai Pendanaan	122
Tabel	4.53	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pendanaan	122
Tabel	4.54	Hasil Penelitian	124



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3.1	Desain Penelitian	30
Gambar 3.2	Analisis Data Model Miles dan Huberman	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Baginda	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor: 0022/SK/D-STIA/UN/K/XII/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang I
- Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 5 Pedoman Observasi
- Lampiran 6 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi desa, yaitu wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya, maka dari itu dalam mengatur dan mengurus urusannya desa dituntut untuk mandiri.

Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan 5 (Lima) peran utamanya yaitu:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Salah satu sasaran pokok dari peran pemerintahan desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Desa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri salah satunya yaitu dengan mengembangkan potensi-potensi desa. Potensi desa disini adalah daya kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan suatu desa guna kesejahteraan masyarakatnya.

Potensi desa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian sebagaimana dikemukakan oleh Soleh (2017: 36-38).

Pertama, yaitu dari potensi fisik suatu desa yang meliputi:

1. Tanah, merupakan sumber daya alam yang paling dominan pada desa. Sumber daya ini misalnya hasil dari sektor pertanian.
2. Air, merupakan sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat desa. Contohnya air dapat diperhitungkan ke dalam sektor perikanan.
3. Iklim, sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Sumber daya ini nantinya dapat dikembangkan menjadi usaha pertanian dan objek wisata.

Kedua, yaitu potensi nonfisik suatu desa yang meliputi:

1. Kondisi masyarakat desa, merupakan kekuatan produksi dan pembangunan desa. Apakah masyarakatnya memiliki sifat gotong royong yang kuat atau tidak.
2. Lembaga sosial, seperti PKK, Karang taruna, serta Organisasi lainnya yang kebutuhannya bergantung pada masyarakat.

Beberapa dari potensi desa diatas dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan ekonomi desa termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), salah satu yang dapat dikembangkan adalah potensi fisik sebuah desa yang kemudian salah satunya bisa dijadikan sebagai sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian desa.

Berwisata di desa, saat ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Inilah yang menjadi alasan pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang membuat Objek Wisata di Kawasan Gunung Gelung yang diharapkan dari pengelolaannya dapat menghasilkan PADes disamping dari pendapatan-pendapatan desa lainnya. Berikut data kunjungan wisatawan dan pendapatan Objek Wisata Gunung Gelung selama 1 (satu) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Total Pendapatan Objek Wisata Gunung Gelung 2020

No.	Bulan	Jumlah Wisatawan	Total Pendapatan (Rp. 5000* x Jumlah Wisatawan)
1.	Januari	15	75.000
2.	Februari	30	150.000
3.	Maret	15	75.000
4.	April	10	50.000
5.	Mei	10	50.000
6.	Juni	15	75.000
7.	Juli	10	50.000
8.	Agustus	20	100.000
9.	September	38	190.000
10.	Oktober	50	250.000
11.	November	44	220.000
12.	Desember	66	330.000
Jumlah		323	1.615.000

*Biaya Tiket Masuk Objek Wisata Gunung Gelung

Sumber: Observasi, 06 Januari 2020

Dilihat dari tabel di atas, fakta yang terjadi saat ini di Kawasan Objek Wisata Gunung Gelung yang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun berjalan adalah jumlah pengunjung masih terbilang sedikit sehingga pendapatan yang diperoleh

belum dapat memenuhi target PADes. Sesuai pengamatan awal penulis, ada beberapa hal yang menghambat pemerintahan desa dalam meningkatkan PADes melalui pengembangan Objek Wisata Gunung Gelung tersebut, diantaranya:

1. Pemerintahan desa sebagai fasilitator kurang memperhatikan pengelolaan Objek Wisata Gunung Gelung, hal ini dibuktikan dengan manajemen yang belum tersusun secara baik.
2. Pemerintah desa sebagai regulator dalam mengembangkan potensi Objek Wisata Gunung Gelung belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga sampai saat ini, *draft* Peraturan Desa (PERDES) mengenai Objek Wisata Gunung Gelung tersebut masih belum di sah-kan.
3. Pemerintah desa sebagai katalisator, dalam hal ini dilihat dari segi anggaran, pemerintah desa terkesan lambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan di lokasi Objek Wisata Gunung Gelung tersebut. Sampai saat ini belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya kenyamanan wisatawan, kemudian dari segi pemasaran juga belum dapat dikatakan optimal. Hal ini terbukti dengan hanya dari warga desa sekitar saja yang berkunjung. Ini menjelaskan bahwa proses pemasaran kurang tepat serta tidak adanya target pasar yang jelas mengakibatkan kurangnya daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Objek Wisata Gunung Gelung tersebut dan secara tidak langsung mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Gelung tersebut sehingga pemerintahan desa memerlukan upaya-upaya yang sesuai dalam menentukan arah perkembangan pendapatan desa yang berhasil guna dan tepat guna. Dengan melihat hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA GUNUNG GELUNG DI DESA BAGINDA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian terfokus kepada permasalahan sebagai berikut.

1. Dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai fasilitator, bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?
2. Dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai regulator, bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?
3. Dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai katalisator, bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)

melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang penulis rumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai fasilitator.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai regulator.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari perspektif peran pemerintah sebagai katalisator.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen Pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai acuan mengenai peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung Di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memecahkan masalah bagi objek penelitian dan bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam hal yang berkaitan dengan peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung Di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi

a. Pengertian Administrasi Secara Sempit

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, dan sebagainya. Adapun administrasi secara sempit menurut Silalahi (dalam Akadun, 2019: 38) mengemukakan bahwa:

Administrasi dalam pengertian sempit juga dapat diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Adapun menurut Anggara (2016: 20) administrasi dimaksudkan sebagai tata usaha atau office work, yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat-menyurat, dokumentasi, pendaftaran atau registrasi, dan soal-soal kearsipan.

Sedangkan menurut Gie (dalam Akadun, 2019: 36) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian administrasi secara sempit yaitu serangkaian kegiatan tata usaha yang memudahkan sekelompok manusia dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Pengertian Administrasi Secara Luas

Administrasi merupakan suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Administrasi sendiri merupakan ilmu yang terus berkembang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Akadun (2019: 39) bahwa administrasi adalah sebagai berikut.

Suatu kegiatan manusia mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasional yang telah ditentukan. Pendayagunaan sumber daya mengandung arti juga suatu kerja sama dua orang atau lebih, tetapi tidak selamanya harus bekerja sama antara dua orang atau lebih secara langsung, pendayagunaan bisa terjadi ketikaseorang manusia menggunakan sumber daya (alam atau buatan) untuk mencapai tujuannya sehingga kerja sama antara dua orang atau lebih itu dapat berjalan secara tidak langsung.

Sedangkan, menurut Anggara (2016: 20-21) menyatakan bahwa pengertian administrasi secara luas dapat dilihat dari tiga sudut, hingga mencakup pula tiga pengertian, yaitu:

Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.

Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.

Dari sudut kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Atmosudirjo (dalam Akadun, 2019: 39-40) memberikan pemahaman administrasi sebagai berikut.

Administrasi sebagai proses maka administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan mulai dari penentuan tujuan, penyelenggaraan hingga tercapainya tujuan

Administrasi sebagai fungsi maka administrasi diartikan sebagai kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan dan termasuk penentuan tujuan itu sendiri.

Administrasi sebagai institusi maka administrasi diartikan sebagai keseluruhan orang dalam satu kesatuan menjalankan kegiatan-kegiatan ke arah tercapainya tujuan.

Dari definisi di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian administrasi secara luas yaitu suatu proses kegiatan manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2016:134), administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses.

Sedangkan menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Juharni, 2015: 3-4) menjelaskan beberapa pengertian administrasi negara dengan beberapa ungkapan sebagai berikut.

Public administration involves the implementation of public which has been determine by representative political bodies. (Administrasi negara meliputi implementasi dari kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik).

Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of the governments. (Administrasi negara dapat di definisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah).

In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skill and techniques which give order and purpose to the efforts of large numbers of peoples. (Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang).

Kemudian Nigro (dalam Juharni, 2015: 4) memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang administrasi negara dan menyatakan bahwa administrasi negara adalah:

- 1) Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- 2) Meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 3) Mempunyai peranan penting dalam formulasi dalam kebijaksanaan publik (*public policy*) dan merupakan bagian dari proses politik.
- 4) Dalam beberapa hal berbeda dengan Administrasi Privat.
- 5) Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi negara yaitu suatu proses kerjasama antara perorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk kebijaksanaan dan keperluan publik.

3. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Administrasi negara memiliki ruang lingkup yang secara implisit berhubungan dengan tata pemerintahan. Akadun (2019: 51) berpendapat bahwa:

Peran administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di negara-negara berkembang sering dipertanyakan. Hal ini terkait dengan paradox administrasi pembangunan, administrasi yang efektif merupakan hal hakiki untuk mewujudkan pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan tetapi justru keefektifan inilah yang dapat menghambat serta mencegah pembangunan politik.

Masalah pertama yang harus dihadapi administrasi publik adalah ketidakmampuan administratif yang dipahami sebagai ketidakmampuan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya seperti minimnya kompetensi SDM di daerah perdesaan.

Masalah kedua administrasi publik berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental administrasi publik, yaitu:

- a. Pandangan bahwa pemerintah harus mengorganisasi diri sesuai dengan prinsip-prinsip hirarki birokrasi.
- b. Apabila pemerintah terlibat dalam suatu bidang maka pemerintah akan secara langsung menjadi penyedia barang dan jasa melalui birokrasinya. Hal ini merupakan prosedur yang standar.
- c. Pemisahan antara administrasi dan politik. Implikasinya, administrasi publik dianggap sebagai salah satu bentuk khusus administrasi dan karena itu memerlukan birokrasi yang profesional yang dipekerjakan seumur hidup dengan kemampuan bersikap netral terhadap pimpinan politik.

Masalah ketiga adalah menyempitnya definisi publik dan hilangnya konsep publik dalam administrasi publik.

Peningkatan peran administrasi publik tidak bisa tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan reformasi untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan mengurangi *public maladministration*, patalogi administrasi, efektifitas kebijakan publik, produktivitas investasi publik dan makin ekonomis-nya majemen publik. Pada dasarnya fokus administrasi publik terbatas pada system administrasi negara dan budaya tertentu, jarang sekali pendekatan studi kebijakan publik atau spesialisasi administrasi publik dipandang dari perspektif global. Perspektif global dipandang sebagai suatu pelecut agar administrasi publik memberikan pelayanan publik secara profesional.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa ruang lingkup administrasi negara sangatlah kompleks dikarenakan luasnya jaringan pelayanan yang harus diberikan kepada para *stakeholdernya* serta diharapkan dapat tanggap dan bekerja secara efektif dan efesien terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), yang sesungguhnya merupakan wilayah kajian dari Administrasi Negara. Pada hakekatnya Administrasi Negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat guna mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Untuk memperkuat adanya kaitan administrasi negara dengan Peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), peneliti berpedoman pada pendapat Siagian (dalam Sondakh, 2017: 3) yang menyatakan bahwa:

Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.

Selain dari pendapat di atas, peneliti juga berpedoman kepada pendapat Sondakh (2017: 3) yang menyatakan bahwa:

Kemajuan dari suatu desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan dalam proses administrasi baik pembiayaan (keuangan), penataan, maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Selain kedua pendapat di atas, peneliti pun berpedoman kepada pendapat Belandatu (dalam Arham, 2019: 25) yang mengemukakan bahwa:

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan di desa perlu memberikan upaya positif untuk mewujudkan kemandirian desa. PADes dapat ditingkatkan agar dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan mencapai kemandirian dan memenuhi kebutuhan secara umum bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam upaya meningkatkan PADes, peran pemerintahan desa sangat penting terutama harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu juga dibutuhkan perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan baik dalam proses administrasi maupun dalam proses pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa. Pemerintahan desa yang dimaksudkan yaitu Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

B. Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan, baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mengingat terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi.

Mengenai pengertian organisasi itu sendiri, Gibson (dalam Duha, 2018: 2) mengemukakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencari sesuatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan”.

Adapun menurut Mulyadi (dalam Duha, 2018: 2) mengemukakan bahwa,

Organisasi hakikatnya adalah sekelompok orang yang memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu, atau menyelesaikan tugas tertentu.

Kemudian Watha dan Newport (dalam Duha, 2018: 2) mengemukakan bahwa:

Sebuah organisasi dapat kita nyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang di desain guna mengoordinasi kegiatan dua orang atau lebih, melalui suatu pembagian kerja dan hierarki otoritas guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu.

Dari beberapa definisi organisasi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok manusia untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

2. Peran Organisasi Publik

Di setiap negara, cakupan organisasi publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Area organisasi publik bahkan sering berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di suatu negara.

Dalam literatur manajemen publik, menurut Samuelson (dalam Taufik, 2016: 14) mengemukakan bahwa “Organisasi publik bermula dari konsep barang

publik (*public goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu”.

Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Organisasi publik tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan bahkan umumnya organisasi yang menghasilkan *pure public goods* adalah pemerintah maka organisasi publik sangat identik dengan pemerintah, walaupun sebenarnya area organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin (dalam Taufik, 2016: 14-15) adalah sebagai berikut.

- a. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
- b. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
- c. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
- d. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
- e. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.

- f. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
- g. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
- h. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
- i. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik.
- j. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa organisasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian pemerintah juga sebagai organisasi publik terbesar bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga bisa terwujud *good governance* dengan sebenarnya.

C. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Pengertian Pemerintah Desa

Di setiap daerah pasti ada pemerintahan yang berlaku dan dilindungi undang-undang dalam melaksanakan tugasnya. Tak terkecuali juga bagi desa yang diatur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa.

Wulandari (2017: 16) mengemukakan bahwa:

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan Pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang juga bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada kepala desa, dan aparatur desa lainnya.

2. Peran Pemerintahan Desa

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Sugiman (2018: 89) kewajiban-kewajiban pemerintahan desa adalah sebagai berikut.

1. Melindungi dan menjaga kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

menjelaskan bahwa Pendapatan Desa dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

- 5) Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- 6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- 8) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Kemudian menurut Permendagri 20 Tahun 2018, Pendapatan desa dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh desa.
- 2) Transfer
Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening desa
- 3) Pendapatan lain-lain
Pendapatan lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas salah satunya adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiaya kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan asli desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.

4. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh peran pemerintahan desa dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Menurut Diva (dalam Putra, 2015: 4), ada 3 (tiga) peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Berikut penjelasannya:

- 1) Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi badan usaha untuk mencapai tujuan pengembangan badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah. Jika pengelola suatu badan usaha mempunyai kelemahan dalam cara pengelolaan dan pengembangannya, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan pengelola badan usaha tersebut dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan. Demikian pula jika badan usaha lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar badan usaha mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi badan usaha menjadi tidak tergantung.
- 2) Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga menyeimbangkan penyelenggaraan pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan badan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.
- 3) Peran pemerintah sebagai katalisator. Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan badan usaha adalah mempercepat proses berkembangnya badan usaha menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan badan usaha yang telah

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan dan penghargaan terhadap badan usaha, dan studi banding.

Berdasarkan uraian dari ketiga peranan pemerintah tersebut, penulis menggunakannya sebagai alat ukur dalam penelitian ini, dimana penulis ingin melihat bagaimana peranan dari Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi dan kelayakan penelitian tentang peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), selain itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perbedaan hasil-hasil penelitian.

Berikut ini peneliti sajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan sekarang ini:

1. Subhan Goma (2015) Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolaang Mongondow Utara” menunjukan bahwa Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan

pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa..

2. Dimas Aditya Andriyanto (2017) Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul “Peran Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pasar tradisional (studi kasus di Desa Sukowari Kecamatan Bondowoso)” menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah sangat baik, dengan menyediakan tempat untuk berjualan para pedagang tanpa dipungut biaya sepeserpun untuk membeli tanah ataupun menyewa tanah untuk berjualan serta selalu meningkatkan pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana setiap tahunnya.
3. Kaharuddin (2013) Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “Peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADESA) di Desa Pennyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu terdapatnya sumber daya yang memadai seperti pertanian dan tambang galian golongan C yang merupakan sumber pendapatan desa yang potensial.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Subhan Goma (Universitas Sam	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan	Sama-sama meneliti tentang peran pemerintah	Berbeda dalam teori yang digunakan.	Hasil penelitian ini menjelaskan pendapatan asli desa di peroleh

	Ratulangi Manado) 2015	Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	dan pendapatan desa Metode penelitian yang digunakan sama.	Locus yang diteliti berbeda.	dari mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdiri dari beberapa unit usaha.
2.	Dimas Aditya Andriyanto (Universita s Muhamma diyah Jember) 2017	Peran Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pasar tradisional (studi kasus di Desa Sukowari Kecamatan Bondowoso)	Sama-sama meneliti tentang Pendapatan desa Metode penelitian yang digunakan sama	Berbeda dalam teori yang digunakan. Locus yang diteliti berbeda.	Hasil penelitian ini menjelaskan pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah sangat baik, dengan menyediakan tempat untuk berjualan para pedagang tanpa dipungut biaya sepeserpun
3.	Kaharuddin (Universitas Muhamaddi yah Makasar) 2013	Peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADESA) di Desa Penyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dan Pendapatan desa Metode penelitian yang digunakan sama	Berbeda dalam teori yang digunakan. Locus yang diteliti berbeda.	Hasil penelitian ini menjelaskan pendapatan desa diperoleh dari sektor pertanian dan tambang galian golongan C

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu dari metode penelitian yang digunakan dan variabel yang diteliti namun berbeda dengan isi pembahasan dan hasilnya. Penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemerintahan desa dalam mengembangkan

potensi-potensi sehingga dapat menghasilkan pendapatan desa demi tercapainya tujuan dalam mensejahterakan masyarakat desa.

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Desa membutuhkan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pendapatan asli desa itu sendiri, dimana pendapatan asli desa (PADes) merupakan gambaran potensi keuangan desa yang pada umumnya mengandalkan dari hasil usaha, hasil asset, swadaya serta partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa sebagai sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa seyogianya dapat menunjukkan kemandirian desa sebagai unit pemerintahan yang otonom. Namun kenyataannya dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), porsi pendapatan asli desa masih selalu terlihat kontribusi yang kecil terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. Hal ini tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa

agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu diperlukan fokus terhadap bagaimana pemerintah desa berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis gambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut.

Peran pemerintahan desa dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli desa masih belum optimal, karena sampai saat ini kontribusi pendapatan asli desa masih sangat kecil.

Landasan Teori

Peran Pemerintahan Desa menurut Diva (dalam Putra 2015: 4)

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator
 - a. Perencanaan
 - b. Pendampingan
 - c. Kondisi yang kondusif
2. Peran Pemerintah sebagai Regulator
 - a. Pembuat kebijakan
 - b. Pembagi wewenang
3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator
 - a. Sosialisasi
 - b. Bergerak cepat
 - c. Pendanaan

Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian 2021

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Adapun untuk menilai sejauh mana peran pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peneliti mengambil teori peran pemerintahan yang berorientasi pada 3 (tiga) jenis peran yang dikemukakan oleh Diva (dalam Putra, 2015: 4) dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Peran Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di
Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator	Item
Peran Pemerintah menurut Diva (dalam Putra, 2015: 4) 	1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator	a. Perencanaan	1, 2, 3, 4, 5, 6
		b. Pendampingan	7, 8
		c. Kondisi yang kondusif	9, 10
	2. Peran Pemerintah sebagai Regulator	a. Pembuat Kebijakan	11, 12, 13, 14
		b. Pembagi Wewenang	15, 16, 17
	3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator	a. Sosialisasi	18, 19, 20, 21
		b. Bergerak cepat	22, 23
		c. Pendanaan	24, 25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Nawawi dan Hadari (2005: 67) memberikan pendapat tentang metode deskriptif sebagai berikut.

Metode deskriptif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, peneliti dapat menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya dilokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Peneliti menggunakan pendekatan induktif. Bacon (dalam Afdi 2018: 28) memberikan pendapat sebagai berikut. “Pendekatan induktif adalah metode pengambilan keputusan yang dimulai dari pernaharnan terhadap kasus-kasus khusus ke dalam bentuk kesimpulan umum”.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat simpulkan bahwa penelitian induktif yaitu bagaimana merangkum data-data dan informasi suatu masalah yang ada dilapangan kemudian menganalisa masalah tersebut berpangkal dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan secara general.

Pendekatan induktif ini mengacu kepada pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teori yang ada akan dikembangkan dengan data yang dikumpulkan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif disebabkan karena penelitian kualitatif lebih bersifat eksploratif. Sugiyono (2018: 9) mengemukakan bahwa:

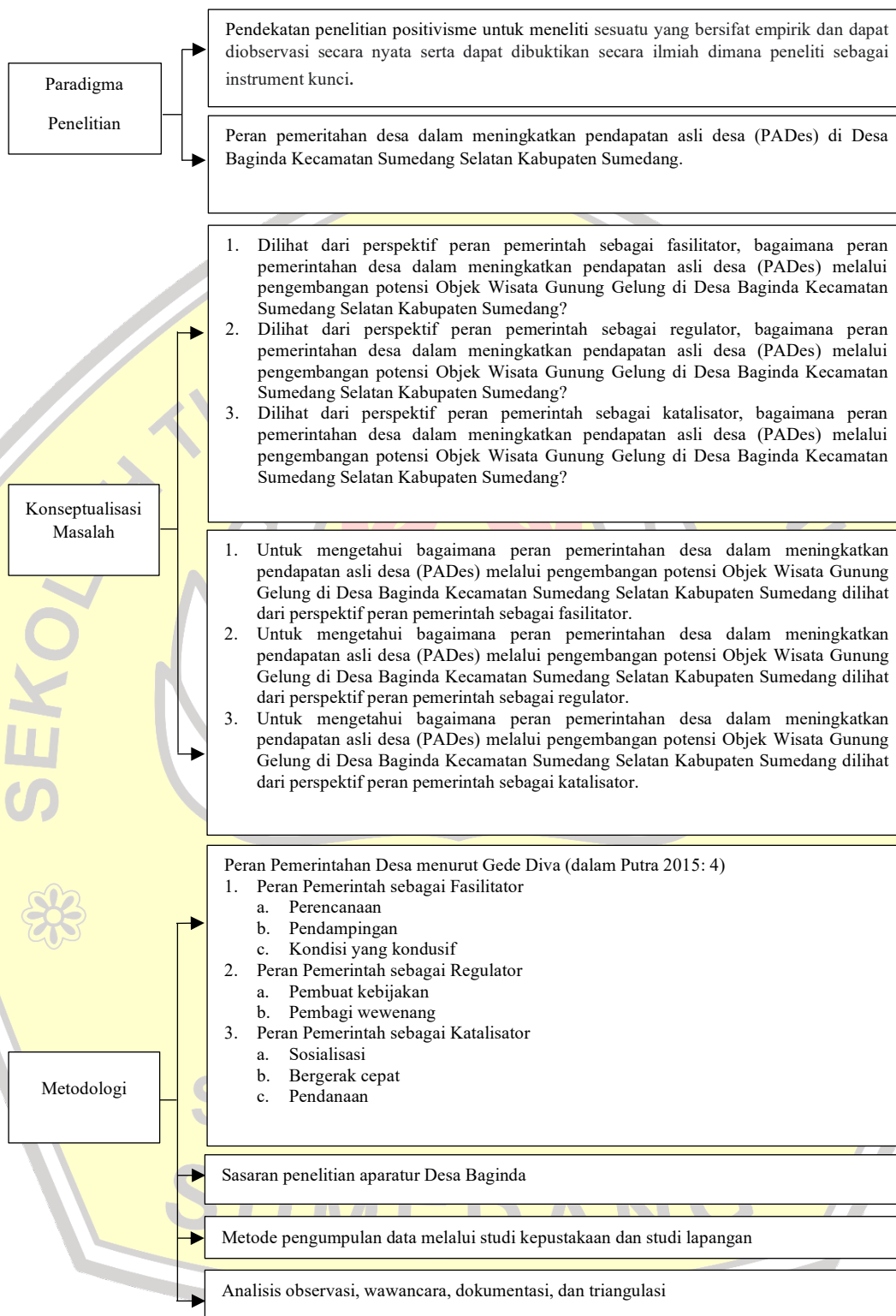
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lebih lanjut, Sugiyono (2018, 9-10) menyimpulkan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya, tidak direayasa, dan mampu menganalisa masalah penelitian secara tuntas, lebih mendalam dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian sebagai berikut.



Gambar 3.1: Desain Penelitian

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian, 2021

B. Penentuan Sasaran Dan Informan Penelitian

1. Sasaran Penelitian

Penentuan sasaran dalam suatu penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel, namun dalam metode penelitian kualitatif, istilah populasi tersebut tidak digunakan melainkan dengan menggunakan istilah *social situation* yang mencakup tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Hal ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 91) sebagai berikut. “Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *social situation* yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi.”

Social situation dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tempat (*place*), yaitu Desa Baginda Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang.
- b. Pelaku (*actors*), yaitu Aparatur Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
- c. Aktivitas (*activity*), yaitu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang berjumlah 12 orang.

2. Informan Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

Menurut Moleong (2007: 132), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi/tempat) penelitian.”

Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan Guba serta Bodgan dan Bilken (Moleong, 2007: 132) yaitu:

- a. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan.
- b. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau memebandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pada penelitaian ini penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*), menurut Sugiyono (2018: 95-96) yaitu sebagai berikut: *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun daftar informan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
2.	Kepala Desa	1
3.	Sekretaris Desa	1
4.	Kepala Kewilayahan 2 (Kepala Dusun 2)	1
Jumlah		4

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang baik secara keseluruhan

maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, disusun dengan tiga (3) jenis teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literature, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara:
 - a. Observasi langsung yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ditempat yang menjadi objek penelitian.
 - b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan memintas penjelasan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.

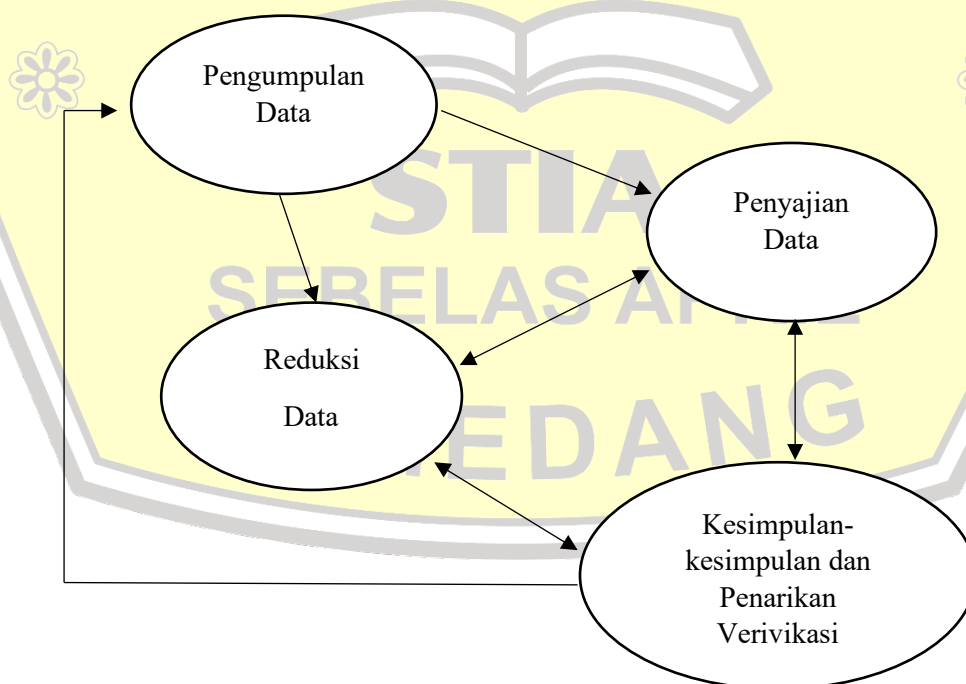
D. Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Model Miles dan Huberman (Sugiyono 2018: 134-142) untuk mengolah hasil wawancara dan observasi peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknis analisis data. Adapun prosedur

pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
2. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tepat dan polanya, sehingga data yang dihasilkan telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.
3. *Data Display* (penyajian data)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan bersifat naratif.
4. *Consclusion Drawing Verification*
Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang mantap. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian yaitu teknik pengumpulan data yang merupakan dari teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas.

Berikut peneliti sajikan gambar teknik analisis data Model Miles dan Huberman:



Gambar 3.2: Analisis Data Model Miles dan Huberman

Sumber: Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2018)

Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yaitu teknik pengumpulan data yang merupakan penggabungan dari teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas (reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi).

E. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai Januari 2021 dengan jadwal penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Kegiatan																								
	a. Perizinan																								
	b. Studi Literature																								
	c. Pengumpulan Data																								
2.	Penyusunan Penelitian																								
	a. Penyusunan Bab I																								
	b. Penyusunan Bab II																								
	c. Penyusunan Bab III																								
3.	Persiapan Sidang UP																								
4.	Sidang UP																								
5.	Penyusunan Penelitian																								
	a. Penyusunan Bab IV																								
	b. Penyusunan Bab V																								
6.	Pembekalan Sidang Skripsi dan Komprehensif																								
7.	Sidang Skripsi dan Komprehensif																								

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV (Empat) mengenai Peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan potensi objek wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari prespektif peran pemerintah sebagai fasilitator sudah bisa dikatakan cukup baik ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Baginda sudah melakukan penataan disekitar wilayah Gunung Gelung, salah satunya dengan adanya akses jalan menuju wilayah Gunung Gelung. Sedangkan dari segi manajemen belum bisa dikatakan baik dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan yang salah satunya dari kualitas sumber daya yang kurang optimal dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional.
2. Peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari prespektif peran pemerintah sebagai regulator belum bisa dikatakan

baik karena walaupun *draft* Peraturan Desa mengenai Gunung Gelung sudah ada, namun sampai saat ini pihak pemerintahan desa belum menyetujui atau mengesahkannya, ini dikarenakan adanya faktor internal antara BPD dan Pemerintahan Desa, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kinerja pemerintahan desa dalam mengelola Gunung Gelung pun terhambat dan otomatis dalam program peningkatan pendapatan asli desa pun sulit direalisasikan.

3. Peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengembangan potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dilihat dari prespektif peran pemerintah sebagai katalisator juga belum bisa dikatakan baik, hal ini dikarenakan:
 - a. Walaupun pihak pemerintahan desa sudah membuat akses jalan ke wilayah Gunung Gelung dan mensosialisasikan Gunung Gelung secara terus-menerus, namun masyarakat tetap tidak mendukung dengan kukuh pada pandangan tradisionalnya dan menghak bahwa penghasilan dari Gunung Gelung adalah milik warga.
 - b. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas menjadi salah satu faktor Gunung Gelung tidak bisa dikenal oleh masyarakat luas, ini dibuktikan dengan tidak adanya kerjasama dengan pihak swasta.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran-saran yang kiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai

bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam proses peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan potensi objek wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan Desa mengenai objek wisata Gunung Gelung segera disahkan. Hal ini untuk mendorong kinerja pemerintahan desa sebagai pengelola Gunung Gelung agar selain alur manajerial maupun penataan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai juga mempercepat terwujudnya objek wisata yang dikenal luas oleh masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desanya. Adapun langkah-langkah agar peraturan desa segera disahkan diantaranya:
 - a Badan Permusyawarahn Desa (BPD) sebagai badan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus bisa menengahi kesalahpahaman yang terjadi dimasyarakat.
 - b Koordinasi dan komunikasi yang efektif dan efesien antara Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa.
2. Dalam upaya menjadikan Gunung Gelung dikenal oleh masyarakat luas yaitu dengan mencoba menggunakan cara baru dalam bersosialisasi dengan masyarakat tidak hanya diskusi atau rapat dengan unsur-unsur desa tetapi juga menggunakan cara modern. Adapun contohnya seperti:
 - a Penyebaran pamplet atau brosur
 - b Promosi *online* melalui media sosial seperti facebook, Instagram, dan lain-lain.

c Pembuatan Website khusus untuk Gunung Gelung.

Hal ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan dan bisa menjadikan objek wisata Gunung Gelung sebagai wisata unggulan Desa Baginda yang otomatis dapat menambah *income* bagi pendapatan Desa Baginda.

3. Kinerja sumber daya manusia yang kurang optimal salah satu penyebab Gunung Gelung ini tidak dikenal luas oleh masyarakat. Ada beberapa saran yang peneliti ajukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu:
 - a Dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan, misalnya dengan mengikuti webinar tentang kewirausahaan, dan lain-lain.
 - b Memberikan motivasi.
 - c Memberikan kritik yang membangun, dan.
 - d Mengapresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian lebih memfokuskan kepada pendapatan yang diperoleh dari hasil pengembangan potensi objek wisata Gunung Gelung ini. Apakah kedepannya akan dikelola oleh BUMDes atau masih oleh Pemerintahan Desa, yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih optimal terkait pengelolaan Gunung Gelung tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akadun. 2019. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arham, Arham. 2019. *Potensi Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Soppeng Riaja (Studi Kasus Desa Paccekke dan Desa Lawallu)*. Jurnal Ekonomi Bisnis. 2(1), 25. Sulawesi Selatan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Parepare. [Online]. Tersedia: <https://jurnalpertanianumpar.com/index.php/economos/article/view/472/273> [02 Maret 2021].
- Duha, Timotios. 2018. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadari and Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hermayanty, I. ., & Yuliyanti. (2020). PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 24-35. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/50>
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makasar: CV. Sah Media.
- Meriza. Afdi. 2018. *Kinerja Wali Nagari Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Nagari Di Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agail Provinsi Sumatera Barat. Diploma Thesis*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. [Online]. Tersedia: <http://eprints.ipdn.ac.id/53/> [27 Februari 2021].

Moleong, Lexi, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narwoko, J. Dwi and Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan: Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.

Putra, Taranggana Gani. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 3(1), 4. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga. [Online]. Tersedia: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpfa25108fdefull.pdf> [03 Februari 2021].

Soleh, Ahmad. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran, 5(1), 32-52. Bandung: Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran. [Online]. Tersedia: <https://www.google.com/search?q=Soleh%2CAhmad.+2017.+Strategi+Pengembangan+Potensi+Desa.+Jurnal+Sungkai+Ilmu+Ekonomi+Universitas+Padjajaran&oq=Soleh%2CAhmad.+2017.+Strategi+Pengembangan+Potensi+Desa.+Jurnal+Sungkai+Ilmu+Ekonomi+Universitas+Padjajaran&aqs=chrome..69i57.1409j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#> [05 Januari 2021].

Sondakh, Sandi Swivan. 2017. *Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 3. Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi. [Online]. Tersedia: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/issue/view/1589> [09 Februari 2021].

Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum, (7)1, 89. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. [Online]. Tersedia: <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16/11> [19 Maret 2021].

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Taufik, Muhammad Aldi. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan. [Online]. Tersedia: <http://repository.unpas.ac.id/9996> [09 Maret 2021].

Wulandari, Sri. 2017. *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin. [Online]. Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/89565196.pdf> [05 Februari 2021].

Dokumen-dokumen

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

